

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum dimana segala tingkah laku dan perbuatan manusia dibatasi oleh hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan pembangunan desa diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pembangunan desa. Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui negara. Oleh sebab itu, perlunya hubungan kerjasama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat agar pemerintah mengetahui apa yang terjadi pada lingkungan masyarakat dan apa yang menjadi kebutuhan mereka, sehingga pemerintah dapat memberikan pelayanan yang semakin baik.

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. (R.H. Unang Soenardjo 1984:11).

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa meletakkan posisi desa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat sesuai hak asal usul desa, sehingga otonomi desa diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sisi lain, dalam posisi desa sebagai bagian dari subsistem penyelenggaraan pemerintahan secara nasional maka desa juga diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagai konsekuensi dari keberadaan desa sebagai sebuah entitas pemerintahan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa desa menetapkan prioritas, program kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang di danai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa, swadaya masyarakat desa, anggaran pendapatan dan belanja kabupaten/kota. Penatausahaan keuangan pemerintahan desa terpisah dari keuangan pemerintahan kabupaten.

Untuk menciptakan pembangunan yang mengarah pada suatu perubahan maka dibutuhkan semangat baru yang membangkitkan aspirasi yang selama ini sangat tertutup. Melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, maka dapat menjadi wadah atau tempat bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, bahwa desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang-undang.

Salah satu kewenangan daerah otonom dalam meningkatkan pembangunan di wilayahnya adalah melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 2 ayat (2) menjelaskan:

“Sistem perencanaan pembangunan nasional mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan

pembangunan jangka panjang 25 tahun, jangka menengah 5 tahun maupun jangka pendek atau tahunan 1 tahun.”

Pembangunan desa merupakan faktor penting dalam kaitannya dengan pembangunan nasional. Oleh sebab itu untuk mensinkronkan pembangunan di desa dengan program pembangunan nasional maka pemerintah melalui kementerian dalam negeri membuat peraturan terkait dengan pembangunan desa yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Undang-undang tersebut mengatur bagaimana proses pembangunan desa seharusnya dilakukan serta siapa saja stakeholder yang terlibat. Salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan di desa adalah bagaimana proses perencanaan yang dilakukan, bahwasanya proses perencanaan kepala desa diwajibkan untuk melakukan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan yang ada di desa khususnya masyarakat desa.

Pemerintah desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat didukung dan ditentukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari Pemerintah Daerah. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di semua tingkatan pemerintah, khususnya pemerintahan desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan pemerintah dalam pembangunan dapat dilihat dari upaya menciptakan kesejahteraan rakyat itu sendiri, baik itu dari tingkat daerah maupun dari tingkat pusat melalui tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah desa, kemudian menyalurkan program bantuan kepada masyarakat. Bentuk penyaluran program kepada masyarakat dapat diwujudkan melalui kegiatan pembangunan desa.

Adanya pembangunan merupakan suatu proses perubahan sosial berencana, karena meliputi berbagai dimensi untuk mengusahakan kemajuan dalam kesejahteraan ekonomi, modernisasi, pembangunan bangsa, wawasan lingkungan

dan bahkan peningkatan kualitas manusia untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Salah satu instrumen penting dalam pembangunan yang wajib disediakan oleh pemerintah adalah ketersediaan infrastruktur karena Infrastruktur merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus terpenuhi untuk menopang aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Salah satu sasaran pokok pembangunan desa adalah memberantas atau mengurangi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup yang lebih layak. Pembangunan desa harus melibatkan sebagian besar penduduk yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, namun sering kali terjadi hasil pembangunan desa tersebut hanya dinikmati oleh sekelompok elite desa atau bahkan orang-orang yang di luar dari lingkungan desa (Suwondo, 2002:73).

Keberhasilan suatu pembangunan adalah hasil dari suatu perencanaan, maka salah satu tolak ukur keberhasilan otonomi daerah dapat dilihat dari pembangunan, seperti terpenuhinya pembangunan infrastruktur bagi masyarakat. Dengan demikian, pelaksana pembangunan bukan hanya dibebankan oleh pemerintah saja, tetapi masyarakat juga harus ikut serta secara aktif mengisi dan melaksanakan pembangunan baik sumbangsih dalam hal pikiran maupun bantuan tenaga.

Peran Kepala desa tentunya wajib melibatkan masyarakat dalam setiap program pemerintahan. Bentuk kebijakannya adalah setiap program yang telah direncanakan wajib disosialisasikan dan memberikan arahan kepada masyarakat secara aktif dan sukarela dalam keseluruhan proses kegiatan pembangunan desa. Partisipasi masyarakat adalah kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah, dimana masyarakat dilibatkan dalam suatu perencanaan serta dalam pelaksanaan pembangunan. Berhasil atau tidaknya pembangunan desa tergantung kepada aparat serta masyarakat sebagai objek maupun subjek pembangunan.

Keberhasilan pembangunan tersebut tidak dapat tercapai jika hanya menyerahkan sepenuhnya kepada aparat desa tanpa melibatkan kerjasama dengan masyarakat untuk mengetahui masyarakat desa. Oleh karena itu, pembangunan desa harus selalu melibatkan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan dan sekaligus

objek yang akan menikmati hasil pembangunan tersebut. Demikian juga dengan pembangunan di Desa Babelan Kota, kepala desa diharuskan berperan aktif dalam menyusun kebijakan strategis yang melibatkan masyarakat dan aparatur desa sebagai bawahannya. Peranan masyarakat juga bagian dari faktor penting yang menentukan suksesnya pelaksanaan program desa agar tercapainya tujuan dari pembangunan desa. Oleh karena itu, dibutuhkan koordinasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan di Desa Babelan Kota Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi agar terciptanya pemerataan pembangunan.

Menurut pengamatan sementara penulis, permasalahan yang terjadi di Desa Babelan Kota Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, proses perencanaan pembangunan desa yang telah dilakukan belum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. Hal itu terlihat dari persyaratan pelibatan pemangku kepentingan yang ada di desa yang sangat minim, perencanaan dilakukan tanpa melakukan pengkajian keadaan desa, keterwakilan unsur masyarakat desa yang dilibatkan. Peran dari kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan masih tergolong lemah, bahkan seolah tidak terlihat fungsinya dalam menggerakkan masyarakat agar berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur di desa Babelan Kota, beberapa infrastruktur di Desa Babelan Kota sendiri sudah banyak yang rusak seperti jalan, tertutupnya saluran air akibat perumahan elit yang mengakibatkan banjir.

Hasil pertemuan peneliti bersama Bapak A. Riyadh selaku kaur perencanaan Desa Babelan Kota pada tanggal 30 Mei 2023 bertempat di Desa Babelan Kota, menurut beliau Desa Babelan Kota dalam pembangunan sudah dibidang cukup baik, banyak program-program yang terlaksana mulai dari sarana dan prasarana pendidikan, keagamaan, kesehatan. Fokus masalah pembangunan saat ini di Desa Babelan Kota adalah pembuatan jaling dan pembuatan saluran air. Pembuatan jaling

dilakukan agar masyarakat desa merasakan aktifitas yang nyaman dan pembuatan saluran air dilakukan juga untuk menghindari banjir.

Tabel 1.1
Realisasi Kegiatan Pembangunan Desa Babelan Kota

No	Nama kegiatan	Alamat/Lokasi	Sedang berjalan	Telah selesai	Keterangan (%)
1	Jalan Lingkungan (Jaling)	Kp. Pulo Asem Rt 013/006 K II		√	100%
2	Jalan Lingkungan (Jaling)	Kp. Pulo Timaha Rw 008		√	100%
3	PJU	Jl. Gelora Raya Sampai Pertigaan Kp. Asem		√	100%
4	PJU	Pertigaan Kp. Asem Sampai Pertigaan Pulo Timaha		√	100%
5	Drainase	Babelan Rt 014/003 K1 Depan SMPN 1		√	100%
6	Pelebaran Jalan	Jl. Raya Gelora Depan Desa Babelan Kota		√	100%
7	Jembatan	Pulo Timaha Rw 009 K III	√		50%
8	Jembatan	Kp. Babelan Rw 02 K1	√		50%
9	Normalisasi Kali	Kali Gundang K I	√		50%
10	Normalisasi Kali	Rw 009 K III	√		50%
11	Rehab Gedung SDN 02	Babelan Rw 003 K1	√		50%
12	Rehab Gedung SDN 05	Babelan Rw 003 K1	√		50%
13	Relokasi Gedung SDN 09	Wahana Pondok Ungu Rw 018 K III	√		50%

Sumber: Data Desa Babelan Kota, 2022

Sejalan dengan uraian diatas, peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat desa Babelan Kota mengenai peranan kepala desa dalam pembangunan desa Babelan Kota dengan pernyataan:

“Menurut saya sebagai warga desa Babelan Kota tentu merasakan peran dari seorang kepala desa selama ini, jika dilihat dari segi pembangunan desa Babelan Kota ini sudah lumayan terlihat program kerjanya seperti pembuatan jaling. Menurut saya sejauh ini mungkin yang harus dapat diperhatikan juga dari kinerja aparaturnya, karena saya merasakan sendiri ketika saya sedang ada keperluan surat-surat dari desa pelayanannya sangat tidak memuaskan cara penyampainnya.” (Informan 1, warga Desa Babelan Kota, 11 Juni 2023)

Peneliti juga melakukan wawancara kepada warga desa Babelan Kota mengenai peranan kepala desa dalam pembangunan desa Babelan Kota dengan pernyataan:

“Kalau dari penilaian saya, selama 2 periode kepemimpinan kepala desa, peran dari seorang kepala desa masih kurang, sebab beberapa fasilitas umum yang sudah ada seketika hilang begitu saja karena kurang diperhatikan. Contohnya saya sebagai warga yang masih menjadi naungan dari Desa Babelan Kota saat ini sedang meresahkan apabila terjadi hujan yang terus menerus akan mengakibatkan banjir di wilayah saya, karena efek dari adanya pembangunan perumahan elit yang menutup saluran air. Itu menurut pandangan saya peran kepala desa kurang berfungsi untuk masyarakat bagaimana kedepannya.” (Informan 2, warga Desa Babelan Kota, 11 Juni 2023)

Berdasarkan uraian data di atas dapat dilihat bahwa peranan kepala desa mempengaruhi tingkat pemerataan pembangunan di Desa Babelan Kota karena dapat dilihat dari data dan hasil wawancara yang peneliti lakukan di Desa Babelan Kota walaupun hanya data sementara. Pembangunan dapat dilihat pada data yang peneliti tuliskan pada Tabel 1.1 Realisasi Kegiatan Pembangunan Desa Babelan Kota tidak adanya pemerataan pembangunan pada Desa Babelan Kota Menurut W.W Rostow (Abdul: 2004:89) pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat terbelakang ke masyarakat negara yang maju.

Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti ingin mengetahui lebih lanjut berkaitan dengan peran kepala Desa Babelan Kota dalam pembangunan desa, sehingga skripsi ini peneliti beri judul **“Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Babelan Kota Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi”**.

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana peranan kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Babelan Kota Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Babelan Kota Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi?
3. Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi penghambat pelaksanaan pembangunan di Desa Babelan Kota Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peranan kepala desa dalam pembangunan di Desa Babelan Kota Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pembangunan di Desa Babelan Kota Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi penghambat pelaksanaan pembangunan di Desa Babelan Kota Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi.

1.4 Signifikansi Penelitian

1.4.1 Signifikansi Akademik

Berdasarkan penelitian permasalahan tentang “Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Babelan Kota Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi” diharapkan hasil dari penelitian ini bisa bermanfaat bagi pengembangan dan keilmuan. Selain itu hasil studi yang dijadikan referensi yaitu:

Satu, H. Purnomo, yang berjudul “Peranan Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kota Tual, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Desa Ohoitahit”. 2022, tujuan dari penelitian ini adalah untuk Pemerintah desa merupakan pemerintahan formal kesatuan masyarakat desa, sebagai badan kekuasaan terendah, pemerintah desa mempunyai kekuasaan atau kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri (otonomi desa) serta kewenangan dan kekuasaan sebagai pelimpahan dari pemerintah di atasnya, dimana desa merupakan tempat segala urusan semua elemen

kesatuan masyarakat desa. Untuk mencapai tujuan pembangunan desa yang merupakan bagian penting dari pembangunan. Artinya, pelaksanaan dan tanggung jawab pembangunan diserahkan kepada kepala desa sebagai koordinator dan pelaksana pembangunan desa yang dipimpinnya. (Purnomo, n.d.)

Dua, Selni paru, yang berjudul “Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Salibabu Kecamatan Salibabu”. 2019, tujuan dari penelitian ini adalah Peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan untuk mengarahkan pencapaian kearah tujuan pembangunan dan mengurangi ketidak efisiennya serta konflik yang merugikan, peran yang dimaksudkan agar para aparat pelaksana pembangunan melihat sumber daya manusia dan sumber daya lain yang dimiliki. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan tergantung pada kemampuan aparat penanggung jawab pelaksana pembangunan, untuk menyusun berbagai sumber daya yang ada dalam mencapai suatu tujuan. Tingkat efektivitas pelaksana pembangunan hendaknya mendapat perhatian yang lebih dari segenap unsur operasional penyelenggara pembangunan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran yang dilakukan oleh kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Salibabu, yang dikaji dari aspek-aspek ilmiah. (Salibabu & Salibabu, 2019)

Tiga, Evicka paat, yang berjudul “Penerapan Kepala Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Pontak Kecamatan Ranoyapo”. 2017, tujuan dari penelitian ini adalah Kepala Desa memiliki kewenangan dalam hal pembangunan desa, kepala desa diwajibkan menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa, pengaturan tentang ini tentunya mengisyaratkan bahwa keikutsertaan masyarakat di dalam proses pembangunan desa sejak perencanaan hingga pelaksanaannya memang benar-benar sangat dibutuhkan. Hal tersebut tujuannya adalah untuk mensinkronkan rencana pembangunan desa yang akan dilaksanakan dengan apa yang dibutuhkan masyarakat khususnya dalam meningkatkan kehidupan dan penghidupannya di desa. (Pontak & Ranoyapo, 2017)

Empat, Dewi Sarah, yang berjudul “Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur”. 2021, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran nyata mengenai bagaimana peran pemerintah desa dalam pembangunan. Peran menjadi indikator awal berhasil tidaknya seorang kepala desa dan perangkat desa dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran pemerintah desa dalam pembangunan dapat disimpulkan bahwa masyarakat mempunyai peran yang kurang baik karena aparat desa kurang mengoptimalkan peran tersebut. macetnya suatu pembangunan desa disebabkan pemerintah desa belum dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hal ini dipengaruhi oleh adanya kurangnya koordinasi antara pemerintah dengan perangkat desa lainnya, kurangnya ketegasan dalam menjalankan fungsinya sebagai pemerintah desa atau kepala desa. (Manulang, 2021)

Lima, Maripah, yang berjudul “Perencanaan Pembangunan Partisipasi Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) Di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar”. 2017, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perencanaan pembangunan desa serta langkah awal yang dilakukan oleh kepala desa bersama dengan kewenangan dalam proses pembangunan desa untuk mengelola sumberdaya hingga bisa dinikmati masyarakatnya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa tahapan proses perencanaan pembangunan di setiap desa belum terlaksana dan partisipasinya masyarakat dalam perencanaan pembangunan masih rendah. (Maripah, n.d.)

Enam, Tri Susanti, yang berjudul “Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Membangun Desa Bandung Rejo Kecamatan Boliyohuto”. 2017, tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi kepemimpinan kepala desa dalam membangun desa Bandung Rejo Kecamatan Boliyohuto dan Untuk mendeskripsikan kepemimpinan kepala desa dalam membangun desa Bandung Rejo Kecamatan Boliyohuto. Sejalan dengan penelitian, maka penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dalam penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan, wawancara dan penelaahan

dokumen. Berdasarkan hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa Kepala Desa sebagai pemimpin formal di desa sebagai seorang motivator, fasilitator dan mediator sangat penting dalam menentukan keberhasilan setiap program dan rancangan pembangunan yang telah direncanakan. Oleh sebab itu fungsi ini harus dilaksanakan dan implementasikan oleh seorang kepala desa dalam rangka pengembangan dan pembangunan desa. (Lamangida et al., 2017)

Tujuh, Agustinus Bali Mema yang berjudul “Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Ombarade, Kecamatan Wewenang Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya”. 2021, tujuan dari penelitian ini adalah Kepala Desa bertanggung jawab melaksanakan pembangunan di wilayahnya dan memenuhi segala kebutuhan warganya, salah satunya adalah penyediaan fasilitas umum melalui pembangunan infrastruktur. Masyarakat Desa Ombarade Kabupaten Sumba Barat Daya sangat membutuhkan sarana prasarana untuk memudahkan masyarakatnya dalam beraktivitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan, serta mengkaji hambatan-hambatan kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan. (Preferensi Hukum & Issn, 2021)

Delapan, Andi Jusriadi Justar yang berjudul “Kualitas Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Erabaru Kecamatan Tellulimpo Kabupaten Sinjai”. 2020, tujuan dari penelitian ini adalah Kepemimpinan Kepala desa sangat diperlukan dalam mensukseskan program-program pembangunan di desanya. Kesuksesan program pembangunan hanya bisa tercapai jika pemimpinannya mampu mengorganisir segala potensi dan sumber daya yang ada didesanya. Sehingga dengan demikian keberhasilan pembangunan di desa disebabkan oleh kepemimpinan yang tepat dan sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kualitas kepemimpinan kepala desa di Desa Erabaru Kecamatan Tellulimpo Kabupaten Sinjai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas kepemimpinan di desa Erabaru kecamatan Tellulimpo kabupaten Sinjai telah dilaksanakan secara baik dan bertanggung jawab dengan indikator tingkat persepsi masyarakat terhadap

kemampuan pengambilan keputusan dan perilaku kepala desa, serta motivasi aparat desa juga tergolong baik terlihat dari sikap optimistis pegawai terhadap kinerja mereka, hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Yukl tentang *considerating* dan *initiating structure*, Penelitian ini merekomendasikan agar kualitas kepemimpinan harus disertai dengan kemampuan manajerial administrasi pemerintahan dan peningkatan pemahaman tugas dan fungsi kepala desa. (Jusriadi et al., 2020)

Sembilan, Mila Pilaili yang berjudul “Peranan Kepemimpinan Kepala Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat)”. 2022, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan kepemimpinan kepala desa dan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik desa. Hal ini dapat dilihat dari keberhasilan seorang kepala desa dalam melaksanakan perannya sebagai motivator, fasilitator, dan mobilisator. Dari ketiga indikator ini kepala desa sudah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana perannya sebagai kepala desa memberikan motivasi kepada masyarakat untuk bersama-sama membangun desa, memberikan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan memberikan dorongan kepada masyarakat. Begitu juga dari masyarakatnya, masyarakat sangat antusias membantu kepala desa disetiap kegiatan desa seperti pembangunan desa dengan ikut berpartisipasi dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pemanfaatan hasil. (Pilaili et al., 2022)

Sepuluh, Herlan Lagantondo yang berjudul “Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Tampemadoro Kecamatan Lage Kabupaten Poso”. 2019, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gaya kepemimpinan Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Tampemadoro Kecamatan Lage Kabupaten Poso dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Tampemadoro Kecamatan Lage Kabupaten Poso adalah gaya konsultatif, partisipasi, demokratis dan

motivator. Namun dari hasil wawancara dari sebagian besar informan penelitian mengatakan bahwa dari keempat gaya kepemimpinan belum berjalan dengan baik dilakukan oleh Kepala Desa sehingga pelaksanaan pembangunan di desa Tampemadoro belum berjalan secara maksimal. faktor utama yang mempengaruhi faktor-faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Tampemadoro Kecamatan Lage Kabupaten Poso, yaitu, faktor kekeluargaan dan sumber daya manusia. (Poso, 2019)

Sebelas, Mukhamad Fathoni yang berjudul “Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pembangunan Fisik Desa (Studi di Desa Denok Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang)”. 2015, tujuan dari penelitian ini adalah Kepala desa merupakan kepala pemerintahan di tingkat desa diharapkan mampu menjalankan roda pemerintahan desa dengan baik dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, sehingga apabila kepala desa menunjukkan kinerja yang bagus dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, maka akan berpengaruh juga pada kinerja pemerintahan pada tingkat kabupaten, provinsi, hingga pusat. Kepala desa sebagai seorang pemimpin di lingkup desa memiliki aspek-aspek kepribadian khas atau gaya kepemimpinan yang dapat menunjang usahanya dalam mewujudkan hubungan yang baik dengan anggota masyarakatnya. Gaya kepemimpinan kepala desa erat hubungannya dengan tujuan yang hendak dicapai oleh suatu pemerintahan desa. Oleh karena itu, gaya kepemimpinan kepala desa selalu dihubungkan dengan kegiatan kepala desa dalam mengarahkan, memotivasi, berkomunikasi, pengambilan keputusan, dan pengawasan anggotanya untuk mewujudkan tujuan pemerintahan desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gaya kepemimpinan kepala desa dalam pembangunan fisik desa. (Fathoni et al., 2015)

Duabelas, Deibby K. A Pangkey yang berjudul “Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Tateli Satu Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa”. 2016, tujuan dari penelitian ini adalah untuk Keberhasilan pembangunan suatu desa tidak terlepas dari peran Kepala Desa sebagai pemimpin yang ada di desa, hal ini juga merupakan fungsi dari pemerintah desa itu sendiri yaitu fungsi pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepala

desa Tatelu Satu dalam pelaksanaan pembangunan, melalui perannya sebagai pemimpin desa dalam membuat kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan, dan anggaran yang digunakan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa peran kepala desa dalam membuat keputusan dan kebijakan pembangunan, masih didasarkan pada program yang telah dirumuskan pada musyawarah perencanaan pembangunan desa yang dilaksanakan setiap tahunnya dengan anggaran yang telah diterima oleh desa melalui dana desa, baik pelaksanaan pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik seperti pembinaan kemasyarakatan yang meliputi pembinaan kelompok tani, pemuda dan ibu rumah tangga. (Minahasa, 2016)

Tigabelas, Hanny Purnamasari yang berjudul “Manajemen Pemerintahan Dalam Pembangunan Desa Di Desa Lemahabang Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang”. 2019, tujuan dari penelitian ini adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa diharapkan dapat membawa paradigma baru dalam pembangunan, mampu mengubah cara pandang pembangunan, bahwa kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi tidak selamanya berada di kota atau perkotaan, tetapi dalam pembangunan yang merata semua lapisan masyarakat yang dimulai dari pemerintahan desa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen pemerintahan dalam pembangunan desa di Desa Lemahabang dilihat dari perencanaan belum efektif karena masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang rencana pembangunan desa, dalam pengorganisasian manajemen pembangunan desa masih belum efektif, hal ini terlihat dari sumber daya manusia aparatur pemerintah belum sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, dalam penggerakan belum efektif karena belum adanya kejelasan tentang teknis pembangunan desa serta berapa lama pembangunan desa akan dilaksanakan dan dalam pengawasan juga masih belum efektif, hal ini terlihat dari belum ada tindak lanjut dari hasil pengawasan yang telah dilakukan baik internal maupun eksternal sehingga hasil dari pembangunan desa belum dapat diketahui. (Suryana, 2019)

Kesimpulan dari beberapa referensi hasil penelitian diatas dapat diuraikan yaitu sangat pentingnya peran seorang kepala desa serta masyarakat untuk ikut serta

dalam program pembangunan desa, dengan adanya kerjasama yang baik antara kepala desa, aparatur desa, dan masyarakat maka akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan.

1.4.2 Signifikansi Praktis

Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar salah satu di fakultas ilmu sosial dan ilmu politik program studi ilmu pemerintahan Universitas Islam 45 Bekasi. Di samping itu, untuk program studi ilmu pemerintahan, penelitian ini diharapkan memberikan gambaran serta pengetahuan baru kepada mahasiswa program studi ilmu pemerintahan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Islam 45 Bekasi tentang “Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Babelan Kota Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi”. Penelitian ini diharapkan sebagai bahan yang memberikan wawasan baru terutama untuk masyarakat setempat. Untuk pemerintah desa, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan demi kemajuan dan perbaikan khususnya di desa dalam penyusunan peraturan yang ada di Desa Babelan Kota Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab dan setiap bab terdiri dari sub-sub pembahasan dengan sistematika penulisan skripsi yang akan dilakukan peneliti berdasarkan pada aturan sistematika yang sudah diteapkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam 45 Bekasi, sehingga dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KERANGKA TEORI

Dimana pada bab ini berisi perspektif teoritik, definisi, kerangka pemikiran, dan asumsi penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan paradigma penelitian, metode penelitian, desain penelitian, sumber dan teknik perolehan data, uji keabsahan data, tempat dan waktu penelitian, jadwal penelitian dan keterbatasan penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dimana pada bab ini berisikan gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan, rekomendasi akademik, dan rekomendasi praktis serta saran untuk penelitian ini.